

Analisa isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Provinsi Jambi selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2005-2010) serta merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang (2010-2015).

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Infrastruktur Daerah

1. **Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama jalan yang relatif rendah** mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah provinsi Jambi maupun dari provinsi Jambi ke Provinsi tetangga. Pembangunan infrastruktur jalan-jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Jambi perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran.
2. **Terbatasnya pengembangan akses perhubungan untuk daerah pantai dan pulau terluar di bagian timur Provinsi Jambi**, serta masih adanya desa yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat. Serta pembebanan berlebihan (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas Timur dan Barat Sumatera yang melalui Provinsi Jambi.

3. **Transportasi sungai, danau dan laut merupakan transportasi tradisional masyarakat Jambi masih belum dimanfaatkan dengan baik.** Transportasi ini relatif lebih murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah. Transportasi ini dapat dimanfaatkan terutama untuk angkutan barang seperti hasil tambang dan hasil pertanian dalam arti luas. Revitalisasi transportasi sungai dan laut perlu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan transportasi sungai dan laut di Provinsi Jambi. Prasarana perhubungan laut belum tersedia Pelabuhan Internasional, yang ada baru pelabuhan laut antar pulau yang masih relatif kecil.
4. Prasarana perhubungan udara **belum tersedia bandar udara internasional**, yang ada hanya satu bandar udara sekunder dan satu bandara udara perintis.
5. **Defisit tenaga listrik yang mencapai 30 MW sehingga pemadaman bergilir harus dilakukan.** Pembangkit listrik sebagian besar masih menggunakan Pembangun Listrik Tenaga Uap dan tenaga diesel dan saat ini hanya tersedia 3 unit pembangkit listrik dengan kapasitas masih dibawah kebutuhan.
6. **Sungai Merangin di Kabupaten Kerinci sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan potensi 350 MW belum termanfaatkan secara optimal.** Provinsi Jambi butuh listrik 181,07 MW sementara kemampuan hanya 155 MW. Disamping itu dapat mengairi sawah-sawah disekitarnya. Jika dibangun PLTA 350 MW maka kelebihan kapasitas dapat didistribusikan pada daerah yang lain.
7. **Kualitas Mutu Air (KMA) yang terdapat pada Sungai Batanghari sudah berada pada tingkat tercemar sedang sampai tercemar berat.**
8. **Pelayanan pos yang belum mampu menjangkau daerah-daerah yang terisolir**, terutama di beberapa kabupaten seperti

Kabupaten Merangin daya jangkau telekomunikasi paling rendah hanya mencapai 30,5 persen wilayah desa.

9. **Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian** seperti waduk dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi.

4.1.2. Sosial Budaya

4.1.2.1. Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan di Provinsi Jambi antara lain:

1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah serta kesadaran masyarakat untuk bersekolah yang masih relatif rendah.
2. Belum meratanya sebaran pendidikan di kabupaten/kota yang menyebabkan perbedaan APK/APM yang mencolok antara kabupaten dan kota.
3. Banyak jumlah sekolah yang rusak, 53.6% dari total 14.747 ruang kelas SD dan 19.6% dari total 2.260 ruang kelas SMP serta 27.37% dari total 1.030 ruang kelas SMA.
4. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat laboratorium yang belum memadai.
5. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.
6. Sistem Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan dengan baik.

7. Belum mantapnya koordinasi antara dinas kabupaten/kota dengan dinas provinsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
8. Pelaksanaan muatan lokal yang masih bersifat umum dan belum menyentuh langsung terhadap kepentingan daerah masing-masing.
9. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu.
10. Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang profesional.

4.1.2.2. Kesehatan

Adapun permasalahan pokok yang dihadapi antara lain ;

1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan dan strata ekonomi dan sosial masyarakat. Pelayanan kesehatan masih bersifat diskriminatif sehingga menyebabkan disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.
2. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi di Provinsi Jambi.
3. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
4. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jambi pada saat ini masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan terpusat di Kota Jambi sementara di sebagian besar ibukota Kabupaten tidak memiliki sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai apalagi di wilayah-wilayah terpencil.

6. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak merata.
7. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan.
8. Terbatasnya kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

4.1.2.3. Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain:

1. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.
2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur.
3. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.
4. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.
5. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

4.1.2.4. Pemuda dan Olahraga

Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:

1. Kurangnya minat pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan.

2. Meningkatnya jumlah pemuda yang terlibat dalam jebakan NAPZA dan HIV/AIDS di sisi lain hal tersebut kurang diikuti dengan upaya-upaya mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya NAPZA dan HIV/AIDS tersebut.
3. Kurangnya pengembangan budaya olah raga di kalangan masyarakat luas.
4. Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta tingkat pendidikan pemuda yang masih relatif rendah.
5. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah.
6. Semakin berkurangnya ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.

4.1.3. Perekonomian Daerah

4.1.3.1. Keuangan Daerah

Fakta dan Permasalahan dari Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. **Penerimaan PAD Provinsi Jambi masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama** yang besarnya pada tahun 2010 mencapai 85 persen dari total penerimaan PAD Provinsi Jambi pada tahun tersebut.
2. **Adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota** yang disebabkan adanya perbedaan karakteristik potensi sumberdaya yang berbeda setiap wilayah. Kabupaten/Kota dengan kapasitas fiskal terbesar adalah Kota Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Bungo, sedangkan kapasitas fiskal terendah di Kabupaten Merangin.
3. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama tahun 2010 mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan **penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil**. Kondisi ini

mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

4. Di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dipenda Provinsi Jambi, **belum dapat segera mengetahui wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum melunasi pajaknya pada tahun bersangkutan.**
5. **Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak** terhadap peranan PKB dan BBN-KB sebagai sumber dana pembangunan daerah.
6. **Kewenangan di beberapa Samsat masih belum optimal.** Sedangkan status samsat telah menjadi Samsat penuh, seperti Samsat Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi dan Samsat Kabupaten Sarolangun.

4.1.3.2. Sumberdaya Ekonomi

1. Menurunnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; rendahnya infrastuktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), penurunan ekspor produk kayu olahan dan karena keterbatasan bahan baku, berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jambi; masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura; keragaman ekspor yang masih rendah; lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.

2. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.
3. Rendahnya pendapatan petani yang tercermin dari nilai NTP petani masih dibawah 100 (98,54) tahun 2009. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli petani di Jambi masih rendah karena rendahnya pendapatan.
4. Setiap tahun lahan–lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih (konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit, sehingga luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura kecenderungan terjadi penurunan, jika tidak diikuti dengan pembukaan lahan – lahan baru.
5. Masih rendahnya pertambahan populasi ternak dari potensi (kapasitas tampung) yang ada.
6. Rendahnya produktivitas yang umumnya terdapat di daerah rawa/pasang surut.
7. Rendahnya kualitas beras yang dihasilkan, karena terbatasnya mesin perontok gabah dan lantai jemur.
8. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanaman.
9. Masih tingginya desa rawan pangan di Provinsi Jambi.
10. Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras).
11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai ideal.
12. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
13. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki teringgal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Jambi.

14. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.
15. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarnya.
16. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersedianya *coldstorge* untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran.
17. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, cold storge, jenis alat tangkap.
18. Merebaknya pencurian ikan dan terjadinya *over fishing*, serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.
19. Masih ada oknum masyarakat yang menggunakan alat tangkap ikan terlarang seperti menggunakan tuba/setrum dan pencurian ikan di laut oleh Kapal Asing.
20. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
21. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
22. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.
23. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah, baik keterampilan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat.
24. Transportasi jalan belum lancar menyebabkan petani kesulitan dalam mendapatkan saprodi dan memasarkan produk.

25. Produksi dan kelestarian perikanan di perairan umum menghadapi tantangan adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan terutama untuk jenis-jenis ikan langka yang hampir punah.
26. Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
27. Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif
28. Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

4.1.4. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan.
2. Belum optimumnya perhatian pada perkebunan rakyat. Memberikan perhatian yang lebih besar pada sub sektor perkebunan, terutama perkebunan rakyat.
3. Kemampuan dan keberlanjutan produksi pangan, pertanian, dan perikanan yang akan menghadapi kendala dan keterbatasan dukungan kapasitas sumberdaya alam.
4. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih).
5. Volume pemanfaatan energi dari tahun ke tahun masih bertambah , dan diperkirakan akan terus tumbuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Kesenjangan antara konsumsi dengan kemampuan memulihkan kembali, dan mengelola pemanfaatan tidak berimbang. Suatu saat jika pemanfaatan tidak dilakukan secara berimbang, dan

substitusi teknologi tidak dikembangkan, ketahanan energi akan terganggu. Hal ini terjadi karena sebagian besar (lebih dari 90%) lapangan minyak yang saat ini beroperasi merupakan lapangan minyak tua (*mature*), sedangkan penambahan lapangan minyak baru tidak dapat mengimbangi laju kebutuhan minyak mentah dalam negeri.

6. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya **konflik atau ketidakselarasan fungsi lahan**, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung. Selain itu kendala lain adalah keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.
7. Rendahnya minat berinvestasi **untuk perusahaan mineral dan batubara**. Keadaan ini disebabkan masalah kepastian hukum dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pertambangan.
8. **Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumberdaya manusia profesional** dalam penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.
9. Pemanfaatan tambang telah menyisakan permasalahan lingkungan. **Reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan ekonomis**, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yang ketat pada tingkat provinsi belum dipersiapkan secara optimal. Di samping itu, pembangunan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya alam belum dilaksanakan, ditata, dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi.

10. Masih tingginya kawasan hutan berstatus '*open access*' merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. **Belum jelasnya tata batas kawasan hutan** menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.
11. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya **fragmentasi habitat satwa** yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa.
12. **Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang tersedia** pada musim hujan dan pada musim kemarau, menyebabkan ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan.
13. Tantangan monokultur tanaman tertentu, berpeluang merubah keseimbangan alam dan perubahan ekosistem, berdampak pada bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

4.1.5. Tata Pemerintahan

4.1.5.1. Pemerintahan Umum

1. **Efektivitas Peraturan Perundang-undangan.** Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan

hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat

2. **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.**

Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program *Single Identification Number (SIN)*, dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh **belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya**. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat.

Di samping permasalahan tersebut di atas, **budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi**. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk

berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan *e-procurement* belum dapat dilaksanakan. Padahal, pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.

3. **Pelayanan Publik.** Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Provinsi Jambi **belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi**, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

Para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Provinsi Jambi masih terkendala dengan berbagai regulasi, system pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi.

Sebagian besar unit pelayanan public belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga penanganan pengaduan seperti "Ombudsman Daerah".

4. **Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.** Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

2. **Pengembangan budaya hukum dan HAM.** Meskipun upaya pengembangan budaya hukum dan HAM terus dilakukan secara sinergi antara pemerinrah dan pemerintah provinsi, dan kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, namun kesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih banyak kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Pada tahun 2009 saja, terdapat 2. 038 kasus pidana, 47 pidana korupsi, dan 349 kasus perdata.
Di sisi lain upaya pendidikan Hukum dan HAM serta Koordinasi penegakan HAM skala provinsi, dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap pemerintah masih belum berjalan optimal. Demikian juga dengan kinerja Panpel RANHAM provinsi dan kab/kota dalam Provinsi Jambi.

4.1.5.2. Politik

1. Tingginya angka partisipasi dalam pemilu ternyata tidak menjamin kualitas pemilu, baik pemilu Kepala Daerah maupun legislatif dan eksekutif. Bahkan ada kecenderungan perubahan pola pikir masyarakat tentang pemilu. Ada anggapan yang keliru bahwa pemilu indentik dengan imbal jasa. Sehingga menimbulkan akses negatif

terhadap berbagai kecurangan dalam pemilu. Khusus partisipasi politik perempuan, meskipun telah mengalami banyak kemajuan. Namun, kondisi ini belum mampu mengubah realitas rendahnya peran politik perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Kendala yang masih dihadapi adalah kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri. Kendala lainnya adalah terkait faktor eksternal, seperti budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidang sosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.

2. Sampai saat ini partai politik belum menunjukkan kinerja parpol yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai parpol, yaitu agregasi dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Selain itu Parpol pun menghadapi beberapa persoalan internal organisasinya, seperti sarana dan prasarana penunjang organisasi, konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belum berjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas SDM kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan lemahnya sistem demokrasi internal dalam partai politik. Akibatnya kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi berkurang.
3. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini

tidak terlepas dari masalah penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagai kekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya. Di sisi lain kondisi saat ini mengindikasikan industri media yang berkembang masih didominasi oleh kepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Jambi dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

- 1) Ketersediaan dan kualitas **infrastruktur fisik** yang kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah
- 2) Rendahnya **kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan daerah**
- 3) Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai tingginya** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin
- 4) **Iklm investasi** yang belum kondusif **yang mendukung** pengembangan ekonomi daerah
- 5) Penataan **Tata Pemerintahan** yang baik
- 6) **Pemanfaatan sumberdaya alam** yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup
- 7) **Kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi sesuai perkiraan** (tidak saja di Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh belahan dunia) serta banyaknya bencana alam yang terjadi, berdampak

signifikan pada pertanian secara luas karena sangat tergantung pada alam. Hal tersebut berimplikasi terhadap ketahanan pangan terutama di Provinsi Jambi. Keadaan ketahanan pangan Provinsi Jambi yang akan diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan terdistribusi secara merata dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat terutama untuk golongan bawah.

- 8) **Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan.** Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan, dengan pertimbangan bahwa sekitar 70% hutan Jambi masih memiliki tutupan hutan dengan kategori baik. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan.
- 9) **Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera** (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan

akan semakin strategis sejalan dengan dimulainya pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA).

- 10) **Permasalahan persengkataan kepemilikan Pulau Berhala** dengan provinsi tetangga yaitu Provinsi Kepulauan Riau yang hingga saat ini belum terselesaikan merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan.
- 11) Kebijakan Nasional dalam **Pengembangan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil** terutama di Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumberdaya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budi daya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri, merupakan potensi lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.
- 12) **Permasalahan klasik bagi wilayah-wilayah berkembang adalah pemenuhan infrastruktur dasar seperti infrastruktur transportasi, listrik, dan air** untuk masyarakat luas yang merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai. Isu ini menjadi sangat penting karena pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi prasyarat utama berjalannya proses pembangunan secara baik, tidak terkecuali Provinsi Jambi. Adalah suatu kemustahilan pembangunan akan berjalan dengan baik jika infrastruktur transportasi tidak memadai, listrik dan air tidak tersedia.
- 13) **Program *Community Development (CD)* atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*** merupakan bentuk kepedulian pihak swasta terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pembangunan ekonomi daerah melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Hal ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi

swasta/masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi.

- 14) Isu strategis lainnya yang langsung berkaitan dengan Provinsi Jambi adalah **perlu penyediaan ruang dan tempat usaha yang layak, nyaman, aman dan memadai** bagi pelaku-pelaku ekonomi terutama pada sektor-sektor informal, termasuk Relokasi Pasar Angso Duo dan penataan Ruang Terbuka Hijau.
- 15) **Perlu pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal dan terbarukan** antara lain seperti Pengembangan Pusat Agribisnis, terutama untuk pasar-pasar domestik dan pasar regional.